

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG TELAH BERSERTIFIKAT
HAK MILIK PERSEORANGAN DI KELURAHAN JATI KECAMATAN
PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT
(Studi kasus : Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

AURELIA MUTIARA SALSA

2110112121

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM
(PK III)**



Pembimbing :

Dr. Yasniwati, S.H.,M.H

Shafira Hijriya, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas	Aurelia Mutiara Salsa	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/01 Maret 2003 b. Nama Orang Tua : Basirman Caniago, Yuliana c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Adat dan Islam e. NIM : 2110112121	f. Tanggal Lulus : 22 Juli 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 tahun 11 bulan i. IPK : 3,71 j. Alamat : Jalan Cipta Karya Nomor 82 B, Pekanbaru	

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM YANG TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK PERSEORANGAN DI KELURAHAN JATI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG SUMATERA BARAT

(Studi kasus : Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg)

(Aurelia Mutiara Salsa, 2110112121, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84 Halaman, 2025)

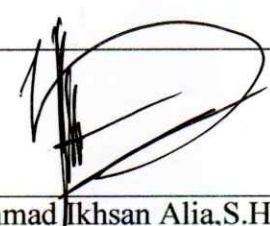
ABSTRAK

Tanah ulayat menjadi pilar utama dalam sistem kepemilikan komunal masyarakat adat, karena dikelola berdasarkan nilai-nilai kekerabatan dan hukum adat serta hasilnya digunakan untuk mendukung ekonomi komunitas. Tanah ulayat di minangkabau dikenal dengan tanah pusako yang diwarisi masyarakat hukum adat Minangkabau secara turun temurun tanpa surat menyurat dan batas bidang tanah secara alami, milik pribadi bersama anggota kaum (ganggam bauntuak). Faktanya karena kurang pahaman tentang “ganggam bauntuak” sering terjadi konflik antar anggota kaum yang menganggap tanah ulayat itu sudah dimiliki bahkan didaftar atau disertifikatkan dengan status hak milik dan itu banyak terjadi. Dalam konteks ini, adanya sengketa tanah ulayat dari salah satu kaum suku Jambak yang ada di daerah kota Padang dalam Putusan No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. Tanah tersebut telah bersertifikat hak milik perseorangan dan perkara ini diselesaikan di Pengadilan Negeri IA Padang. Pihak yang terkait Syamsul Akbar selaku (penggugat I), Afnida (Penggugat II), Zaharni (Penggugat III) melawan Adrian (Tergugat I), Swardi, Ferdi, Yola (Tergugat II a,b,c) dan Pemerintah Kota Padang cq Kantor Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III) dengan luas tanah ulayat 1.000m² tercatat atas nama Almh ERNI (Mantan Istri Tergugat I). Maka dari permasalahan tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat hak milik perseorangan dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg? 2. Apa akibat hukum dari putusan no 89/pdt.G/2022/PN Pdg terhadap status tanah ulayat kaum yang disengketakan? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat hak milik perseorangan dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. 2. akibat hukum dari putusan no 89/pdt.G/2022/PN Pdg terhadap status tanah ulayat kaum yang disengketakan.

Kata Kunci : Tanah Ulayat Kaum, Sengketa Tanah Ulayat, Hak Milik, Penyelesaian secara Litigasi

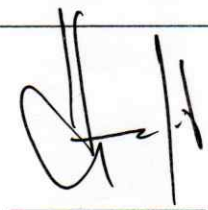
Skripsi ini telah dibuat dan dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 22 Juli 2025.

Penguji

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Hj. Ulfanora, S.H., M.H	Muhammad Ikhsan Alia, S.H., LLM

Mengetahui,

Ketua departemen Perdata : Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum



Alumnus telah mendaftar ke fakultas / Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

	No. Alumni Universitas	Aurelia Mutiara Salsa	No. Alumni Fakultas
	a. Place/Date of Birth : Jakarta/ 1 Maret 2003 b. Parents' Name : Basirman Caniago, Yuliana c. Faculty : Law d. Concentration : Customary dan Islamic Civil Day Student ID : 2110112121	f. Graduation Date : 22 th Juli 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 11 month i. GPA : 3, 71 k. Address : Jalan Cipta Karya Nomor 82 B, Pekanbaru	

ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION OF THE RESOLUTION OF THE DISPUTE OF THE ULAYAT KAUM LAND THAT HAS BEEN CERTIFIED WITH PERSEQUAL MILIK HAKES IN JATI FAMILY KECAMATAN PADANG TIMUR CITY PADANG WEST SUMATERA

(Case study: Decision Number 89/Pdt.G/2022/PN Pdg)

(Aurelia Mutiara Salsa, 2110112121, Faculty of Law, University of Andalas, 84 Pages, 2025)

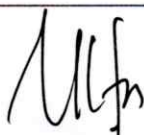
ABSTRACT

Customary land is the main pillar in the communal ownership system of indigenous peoples, because it is managed based on kinship values and customary law and the results are used to support the community's economy. Communal land in Minangkabau is known as pusako land inherited by the Minangkabau customary law community from generation to generation without correspondence and natural land boundaries, private property with members of the community (ganggam bauntuak). In fact, due to a lack of understanding about "ganggam bauntuak", conflicts often occur between members of the community who consider that customary land is already owned and even registered or certified with the status of property rights and that happens a lot. In this context, there is a customary land dispute from one of the Jambak tribe in the Padang city area in Decision No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. The land has been certified as individual property rights and this case was resolved at the Padang District Court IA. The parties involved Syamsul Akbar as (plaintiff I), Afnida (Plaintiff II), Zaharni (Plaintiff III) against Adrian (Defendant I), Swardi, Ferdi, Yola (Defendant II a,b,c) and the Padang City Government cq National Land Agency Office (Defendant III) with an area of customary land □1,000m2 recorded in the name of Almh ERNI (Former Wife of Defendant I). So from these problems, the following problem formulation emerged: 1.How are the considerations of judges in handing down civil decisions on the settlement of disputes over communal land that has been certified as individual property rights in Decision Number 89/Pdt.G/2022/PN Pdg? 2.What are the legal consequences of Decision No. 89/Pdt.G/2022/PN Pdg on the status of the disputed communal land? The research method used is qualitative, with a normative juridical approach and descriptive analysis. Data collection techniques through document studies. The results of research and discussion are: 1. Judges' considerations in handing down civil decisions on the settlement of disputes over communal land that has been certified as individual property rights in Decision Number 89/Pdt.G/2022/PN Pdg. 2. the legal consequences of decision no. 89/pdt.G/2022/PN Pdg on the status of the disputed communal land.

Keywords: Customary Land, Customary Land Disputes, Property Rights, Litigation Settlement

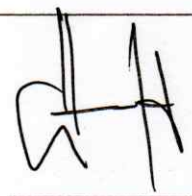
This minor thesis has defended in front of the examiner team at July 22th 2025

Examiner

Signature	1. 	2. 
Name	Hj. Ulfanora, S.H.,M.H	Muhammad Ikhsan Alia, S.H., LLM

Acquainted,

Head of the departement of state civil law: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum



Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number :

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature: